



WBK



MULTIHILIX

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN TEMANGGUNG



Jl. Jenderal Sudirman No.41-42,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,

dpm_temanggungkab



dpmptsp.temanggungkab.go.id



dpmptsp.temanggungkab



0293-491283



**NJO INVESTASI, MAYAR IZINE
DPMPTSP MENUJU WBBM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Tujuan yang ingin dicapai yaitu ”Meningkatnya Realisasi Investasi dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)”, khususnya dalam memberikan kontribusi atas mewujudkan stabilitas ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi dan kualitas Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Perizinan), karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan melalui keberadaan Mal Pelayanan Perizinan (MPP) dan Mal Pelayanan Perizinan Digitas (MPPD) Kabupaten Temanggung.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang ingin dicapai dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
 STRATEGIS DPMPTSP.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	8
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	8
2.1.1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	9
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	9
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	9
2.1.2.2 Asset/Modal.....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	11
2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	12
2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	13
2.1.14 Kelompok Sasaran Layanan.....	14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP.....	14
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.2.2 Isu Strategis.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	17
3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.....	17
3.2 Strategi.....	20
3.3 Arah Kebijakan.....	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	23
BAB V PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana DPMPTSP	10
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPMPTSP	11
Tabel 2.3 Capaian SPM DPMPTSP	12
Tabel 2.4 Capaian IKU DPMPTSP	12
Tabel 2.5 Capaian IKK DPMPTSP	13
Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	16
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP	19
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra DPMPTSP	20
Tabel 3.5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	22
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra DPMPTSP	24
Tabel 4.2 Tujuan Renstra DPMPTSP	27
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan	34
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	45
Tabel 4.5 IKU DPMPTSP	46
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	47
Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	9
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	18
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	18
Gambar 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Penanaman Modal. Pembangunan di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Penanaman Modal;
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah);
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029;
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD);
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur;
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra perangkat daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya perangkat daerah;
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah).

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada);
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada);
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

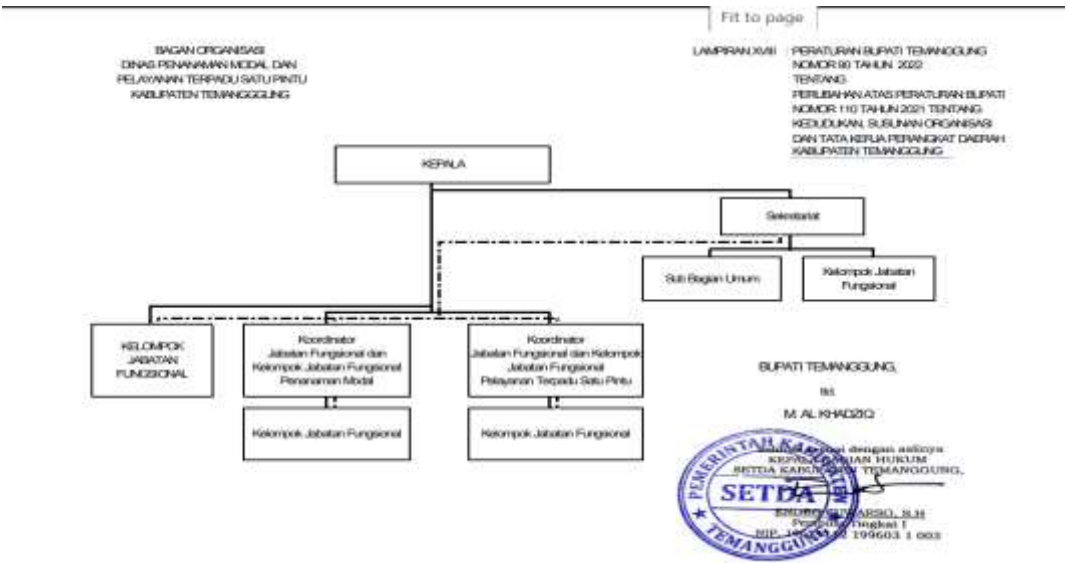
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung



Sumber: Peraturan Bupati Temanggung nomor 90 tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2															
KEPALA DINAS DPMPTSP						1					1		1	1	1
Eselon 3															
SEKRETARIS															
Eselon 4															
KASUBBAG UMUM					1					1					1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL															
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA						3				2	1				1
ANALIS HUKUM AHLI MUDA					1					1					
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA					1										
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA					2										
PERENCANA AHLI PERTAMA					1					1					
PRANATA KOMPUTER MAHIR				1						1					
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL				1					1						
NON ESELON															
Bendahara					1					1					
Verifikator Keuangan				1					1						
Penelaah Teknis Kebijakan					1	1				2					
Pengadministrasi Perkantoran	1										1				
P3K					3										

Sumber : portal-bkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

No.	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Tanah	1	1.035.250.000	Kondisi Bagus
2	Peralatan dan Mesin	654	3.680.304.411	396 kondisi Bagus, 180 Rusak Ringan 78 Rusak berat
3	Gedung dan Bangunan	3	9.479.084.003	2 kondisi Bagus, 1 Rusak Ringan
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	67.429.230	Kondisi Bagus
5	Aset Tetap Lainnya	1	66.500	Kondisi Bagus
	JUMLAH ASET TETAP	659	14.262.134.144	

Sumber: simbada.temanggungkab.go.id

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan

akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
				NIHIL			

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat disampaikan bahwa DPMPTSP tidak memiliki urusan wajib pelayanan dasar yang termasuk dalam lingkup SPM. Urusan pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar sehingga tidak menjadi bagian dari pelaporan indikator SPM, dengan demikian pelaporan SPM DPMPTSP untuk tahun 2020 hingga 2024 adalah NIHIL.

2.1.3.2 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2020-2024
(Milyar)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Realisasi Investasi	1.245,66	1.496,68	1.836,00	2.046,25	2.145,09	IKU 2019-2023
2.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	231,6%	20,2%	22,7 %	11,5%	4,8%	IKU 2024-2026

Sumber : DPMPTSP data diolah

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu tahun 2029 yaitu Realisasi Investasi dengan target yang terus mengalami peningkatan. Namun target dalam Renstra 2024-2026 target IKU berganti menjadi Pertumbuhan Realisasi Investasi dengan target Awal tahun 2024 sebesar 2.5% dan tercapai sebesar 4.8%.

DPMPTSP Kabupaten Temanggung selama periode 2020-2024 telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah, Peningkatan nilai dan pertumbuhan realisasi investasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung

2.1.3.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	231,6 7%	20,15 %	22,67 %	11,45 %	4,83 %	
2	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	0%	0%	0%	0%	0%	Tidak ada panas bumi yang dapat dimanfaatkan

Sumber : DPMPSP data diolah

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mengalami lonjakan signifikan hal ini merupakan dampak dari pemulihan investasi pasca penyesuaian dan peningkatan pelaporan realisasi investasi. Pertumbuhan mengalami penurunan secara bertahap pada tahun 2021 hingga 2024 mencerminkan stabilisasi dan konsolidasi iklim investasi di Kabupaten Temanggung dengan tetap mempertahankan tren kenaikan nilai investasi. Hal ini menunjukkan peran aktif DPMPTSP dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, promosi investasi, serta pelayanan berbasis sistem OSS.

Tidak terdapat potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis di wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga

tidak ada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatannya. Oleh karena itu, indikator ini tetap bernilai 0%, bukan karena kinerja rendah, tetapi karena tidak relevan dengan kondisi geografis dan sumber daya daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Pemohon Perizinan dan non Perizinan;
2. Pelaku Usaha;
3. Investor;
4. PD Teknis; dan
5. Pemangku Kepentingan dalam Bidang Penanaman Modal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain;

1. Belum optimalnya promosi penanaman modal dikarenakan belum tersedia I- Pro yang bisa ditawarkan

Hal tersebut dikarenakan banyak proyek I Pro yang hanya berisi gambaran umum tanpa studi kelayakan dan tidak dilengkapi dengan adanya analisis pasar. Minimnya partisipasi dalam forum investasi untuk mempromosikan.

2. Belum optimalnya Investasi PMA dan PMDN dikarenakan infrastruktur di Kawasan Peruntukan Industri belum tersedia;

3. Belum maksimalnya peta potensi investasi.

Salah satu instrumen strategis dalam upaa peningkatan inestasi daerah adalah keberadaan Peta Potensi Inestasi yang komprehensif akurat dan mudah diakses oleh calon investor. Namun demikian hingga tahun 2024 pemanfaatan dan pengembangan peta potensi investasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Pemerintah Kabupaten Temanggung mengembangkan investasi di bidang Industri Menengah-Besar dan UMKM sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang industri menengah-besar dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan investasi UMKM di luar KPI. Potensi yang dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 991 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Ha di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat satu) Ha namun baru dimanfaatkan kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) Ha- Realisasi investasi pada Tahun 2024 didominasi oleh sektor UMKM dengan total 12.733 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.838 orang. Memberikan sumbangan 48% dari total realisasi investasi sebesar Rp.2.145.092.838.518,-.- Rencana Pembangunan exit tol Jogja Bawen di Kecamatan Pringsurat menjadi pendukung pengembangan ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Temanggung	<p>Belum Maksimalnya Investasi (KPI dan Non KPI</p> <ol style="list-style-type: none">1.Belum optimalnya promosi penanaman modal dikarenakan belum tersedia I-Pro yang bisa ditawarkan2.Belum optimalnya Investasi PMA dikarenakan infrastruktur di Kawasan Peruntukan Industri belum tersedia;3.Belum maksimalnya peta potensi investasi.	<p>Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah</p>	<p>Peningkatan Kontribusi Industri bagi Ekonomi Daerah dengan Dukungan Riset</p>	<p>Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi</p>	<p>Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kajian Potensi Investasi- Promosi potensi investasi- Sarana prasarana Kawasan Peruntukan Industri

BAB III

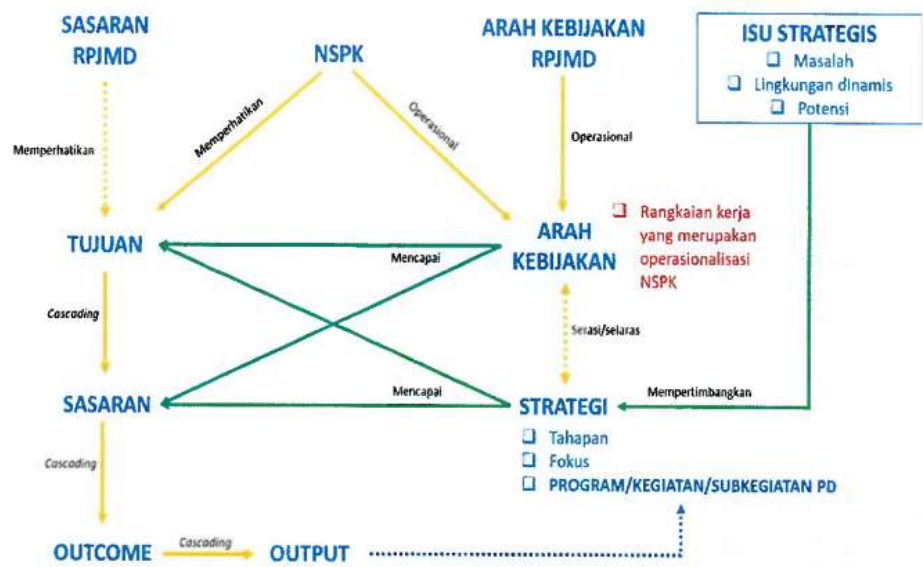
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

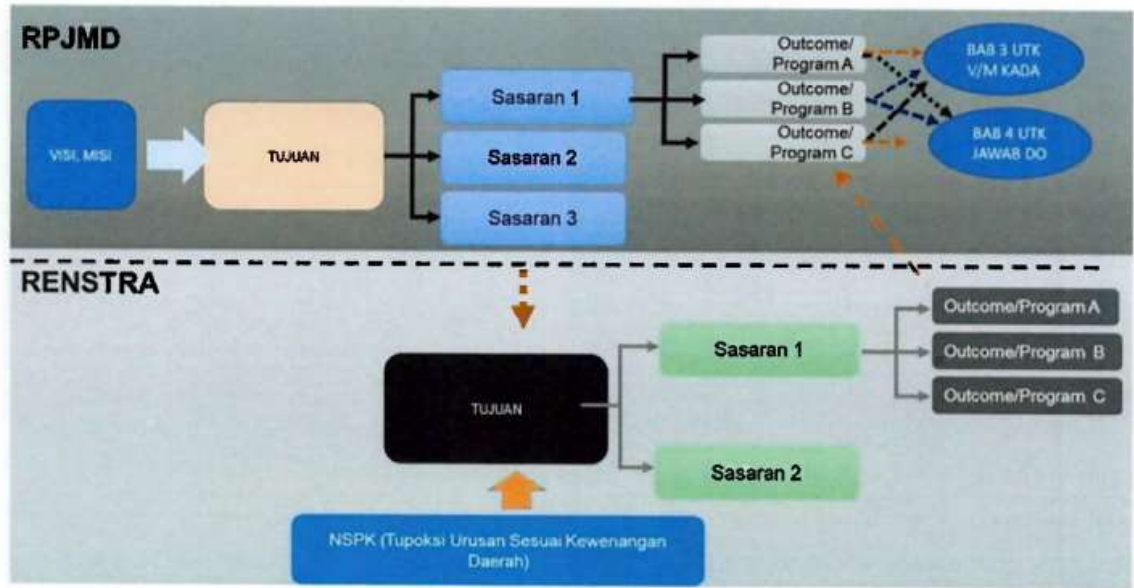
Gambar 3.1



Konsep Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	BASELINE 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)		Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	2.145 Milyar	2.150 Milyar	2.152 Milyar	2.155 Milyar	2.157 Milyar	2.160 Milyar	2.162 Milyar	
		Meningkatnya Proyek Investasi	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN (Proyek)	0	5.010 Proyek	5.020 Proyek	5.030 Proyek	5.040 Proyek	5.050 Proyek	5.060 Proyek	
		Meningkatnya jumlah layanan di MPP (Mal Pelayanan Perizinan)	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP (Layanan)	0	1 Layanan	2 Layanan	4 Layanan	6 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	Tahun 2024 Jenis Layanan sebanyak 132 dengan peningkatan secara berkelanjutan hingga bertambah menjadi 140 di tahun 2030
			Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (%)	0	90%	92%	94%	96%	97%	98%	

2.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Melakukan identifikasi jenis layanan perijinan, investasi, dan administrasi yang belum terintegrasi di Mall Pelayanan Publik	Meningkatkan jumlah layanan perijinan, investasi, & administrasi di Mall Pelayanan Publik secara bertahap	Meningkatkan jumlah layanan perijinan, investasi, & administrasi di Mall Pelayanan Publik secara bertahap	Meningkatkan jumlah layanan perijinan, investasi, & administrasi di Mall Pelayanan Publik secara bertahap	Meningkatnya jumlah layanan perijinan, investasi, & administrasi di Mall Pelayanan Publik
Meningkatkan jumlah layanan perijinan, investasi, & administrasi di Mall Pelayanan Publik secara bertahap	Meningkatkan kecepatan & kemudahan pelayanan pengurusan perijinan, investasi, & administrasi	Meningkatkan kecepatan & kemudahan pelayanan pengurusan perijinan, investasi, & administrasi	Meningkatkan kecepatan & kemudahan pelayanan pengurusan perijinan, investasi, & administrasi	Meningkatnya kecepatan & kemudahan pelayanan pengurusan perijinan, investasi, & administrasi
Mengidentifikasi Program Strategis PD untuk mendapatkan dukungan dari multipihak	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Meningkatnya kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam pendanaan & non pendanaan program pembangunan daerah
Mengidentifikasi Program Strategis PD untuk mendapatkan dukungan dari multipihak				
Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Membangun kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam mendapatkan dukungan pendanaan & non pendanaan	Meningkatnya kerjasama dengan mitra strategis pembangunan dalam pendanaan & non pendanaan program pembangunan daerah
Mempromosikan potensi & sumberdaya Kab. Temanggung	Mempromosikan potensi & sumberdaya Kab. Temanggung	Mempromosikan potensi & sumberdaya Kab. Temanggung	Mempromosikan potensi & sumberdaya Kab. Temanggung	Menguatnya pemanfaatan potensi & sumberdaya Kab. Temanggung

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memfasilitasi perikatan kerjasama antara dunia usaha & UMKM	Memfasilitasi perikatan kerjasama antara dunia usaha & UMKM	Memfasilitasi perikatan kerjasama antara dunia usaha & UMKM	Memfasilitasi perikatan kerjasama antara dunia usaha & UMKM	
Mengidentifikasi Profile & Produk UMKM Temanggung				
Menjaring Mitra Dunia Usaha yg memiliki bisnis inti yang selaras dengan produk UMKM	Menjaring Mitra Dunia Usaha yg memiliki bisnis inti yang selaras dengan produk UMKM	Menjaring Mitra Dunia Usaha yg memiliki bisnis inti yang selaras dengan produk UMKM	Menjaring Mitra Dunia Usaha yg memiliki bisnis inti yang selaras dengan produk UMKM	Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha yg bermitra dengan UMKM Temanggung
Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan (Tematik) untuk Mempromosikan Potensi & Sumberdaya Temanggung	Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan (Tematik) untuk Mempromosikan Potensi & Sumberdaya Temanggung	Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan (Tematik) untuk Mempromosikan Potensi & Sumberdaya Temanggung	Penyelenggaraan Kegiatan Tahunan (Tematik) untuk Mempromosikan Potensi & Sumberdaya Temanggung	KegiatanTahunan (Tematik) secara reguler
Berpartisipasi dalam event strategis yang memiliki dampak pada peningkatan investasi di Temanggung	Berpartisipasi dalam event strategis yang memiliki dampak pada peningkatan investasi di Temanggung	Berpartisipasi dalam event strategis yang memiliki dampak pada peningkatan investasi di Temanggung	Berpartisipasi dalam event strategis yang memiliki dampak pada peningkatan investasi di Temanggung	Peningkatan investasi dan kerjasama dunia usaha di Temanggung
Mendorong kerjasama dengan pemda tetangga maupun daerah strategis di dalam Provinsi untuk pengembangan investasi dan ekonomi	Mendorong kerjasama dengan pemda tetangga maupun daerah strategis di dalam Provinsi untuk pengembangan investasi dan ekonomi	Mendorong kerjasama dengan pemda tetangga maupun daerah strategis di dalam Provinsi untuk pengembangan investasi dan ekonomi	Mendorong kerjasama dengan pemda tetangga maupun daerah strategis di dalam Provinsi untuk pengembangan investasi dan ekonomi	Terbangunnya kerjasama dengan pemda tetangga maupun daerah strategis di dalam Provinsi untuk pengembangan investasi dan ekonomi
Penataan internal 1. evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja 2. penataan SOP 3. Penguatan SDM:pelatihan Perizinan, penanaman modal dan pelayanan publik	Digitalisasi dasar 1. Optimaslisasi SIPD 2. penerapan pelayanan digital 3. pembukaan dsbord kinerja program DPMPTSP ke publik	Integrasi dan kolaborasi 1. integrasi lintas sektor dan PD 2. penguatan kemintraan	Inovasi layanan	Transformasi layanan dari media konvensional menjadi media digital
Penguatan dasar teknis dan penelarasan internal 1. Menyusun pedoman teknis internal penyusunan dokumen kinerja (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi, SKP, LKjIP) sesuai prinsip SAKIP dan cascading. 2. Membentuk Tim Penjamin Kualitas Kinerja dan SOP review LKjIP internal. 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pembahasan dan reviu kinerja.	Penyeragaman dokumen dan peningkatan keterpaduan sistem 1. Mengembangkan format LKjIP yang memenuhi seluruh unsur sistematika dan kualitas pelaporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB. 2. Menyusun glosarium indikator kinerja dan definisi operasional untuk menghindari perbedaan tafsir.	Memastikan kebermanfaatan laporan kinerja sebagai alat perbaikan 1. Menyusun template reviu berjenjang untuk pelaporan kinerja internal. 2. Membuat mekanisme korelasi antara capaian kinerja dan efisiensi anggaran. 3. Meningkatkan kualitas IKPD triwulanan agar digunakan dalam penyesuaian kegiatan (Renja dan DPA).	Peningkatan kualitas LKjIP dengan pembanding eksternal dan inovasi 1. Menyusun benchmark capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di daerah lain. 2. Mengembangkan format LKjIP yang menyajikan perbandingan dengan standar nasionall. 3. Mendorong inovasi dalam pelaporan, misalnya dalam bentuk visualisasi	Memastikan keberlanjutan dan replikasi praktik terbaik 1. Mengarsipkan dan mendokumentasik an seluruh prosedur baku penyusunan dokumen kinerja berkualitas. 2. Menyusun laporan praktik baik (best practices) pelaksanaan akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
4. Melakukan pelatihan penyusunan LKjIP berkualitas untuk seluruh pejabat fungsional.	3. Mengembangkan dashboard pemantauan capaian indikator kinerja strategis DPMPTSP 4. Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan diunggah tepat waktu ke website PPID.	4. Membangun budaya kerja berbasis hasil melalui forum evaluasi kinerja triwulan.	capaian kinerja, infografik, dan storytelling data. 4. Mengembangkan sistem feedback internal dari stakeholder DPMPTSP atas dokumen kinerja.	

2.3 Arah Kebijakan

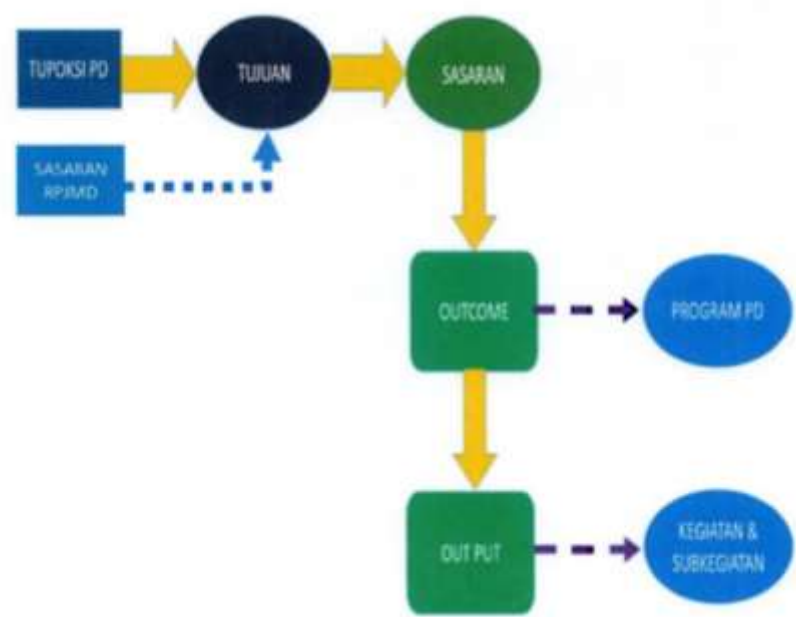
Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RANWAL RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan Penanaman Modal	Peningkatan Perusahaan Yang Bermitra	Peningkatan Perusahaan Yang Bermitra	
		Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan	Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan	
		Penyediaan Kajian Teknis Potensi Investasi	Penyediaan Kajian Teknis Potensi Investasi	
		Peningkatan Promosi Potensi Investasi	Peningkatan Promosi Potensi Investasi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.691.337.570,00		4.871.829.732,00		4.947.408.000,00		4.993.371.573,00		4.979.448.019,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.580.337.570,00		3.610.192.032,00		3.668.233.536,00		3.778.822.334,00		3.765.302.299,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	93.35	94	95	3.580.337.570,00	95.50	3.610.192.032,00	96	3.668.233.536,00	96.50	3.778.822.334,00	97	3.765.302.299,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.070.000,00		101.460.973,00		6.202.106,00		6.206.447,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi (%)	0	90	92	100.000.000,00	94	100.070.000,00	96	101.460.973,00	98	6.202.106,00	98	6.206.447,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					700.000.000,00		850.350.000,00		862.169.865,00		885.842.196,00		885.203.986,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)	70	90	92	700.000.000,00	94	712.448.400,00	96	716.402.126,00	98	729.983.287,00	98	729.498.476,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					212.000.000,00		212.148.400,00		215.097.263,00		219.141.091,00		219.294.490,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo (%)	0	90	92	212.000.000,00	94	212.148.400,00	96	215.097.263,00	98	219.141.091,00	98	219.294.490,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	90	92		94		96		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					99.000.000,00		99.069.300,00		100.446.363,00		103.363.846,00		103.440.797,00	

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal (%)	0	90	92	99.000.000,00	94	99.069.300,00	96	100.446.363,00	98	103.363.846,00	98	103.440.797,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					4.691.337.570,00		4.871.829.732,00		4.947.408.000,00		4.993.371.573,00		4.979.448.019,00	

Berdasarkan tabel 4.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD melalui pelaksanaan fungsi di bidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam rangka mewujudkan **Diversifikasi dan penciptaan kegiatan ekonomi**, disusun berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk **meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP)**.

Secara keseluruhan, teknis perumusan program dan kegiatan dalam Renstra DPMPTSP disusun secara sistematis dan terintegrasi mulai dari penyusunan peta potensi investasi, fasilitasi kemitraan usaha, promosi investasi, pelayanan perizinan, hingga pengendalian pelaksanaan investasi. Setiap kegiatan memiliki outcome dan output yang jelas serta indikator terukur guna mendukung pencapaian sasaran strategi RPJMD Kabupaten secara berkelanjutan dan berorientasi hasil.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)	Meningkatnya Proyek Investasi			Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN		
					Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya jumlah layanan di MPP (Mal Pelayanan perizinan)			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP		
					Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa tujuan Renstra DPMPTS adalah meningkatnya realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Outcome yang diharapkan berupa peningkatan nilai dan jumlah proyek investasi serta peningkatan kemudahan berinvestasi. Program-program pendukung meliputi:

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan kegiatan:
 - Fasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM
 - Penyusunan peta potensi investasi
- **Program Promosi Penanaman Modal**, yang mencakup:
 - Pelaksanaan dan penyusunan strategi promosi penanaman modal

Dalam rangka meningkatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), DPMPTSP juga menargetkan:

- Peningkatan jumlah jenis layanan dan kualitas standar pelayanan
- Peningkatan akuntabilitas keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

Program yang mendukung hal ini adalah:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, melalui:
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan administrasi
 - Penyediaan gaji, tunjangan ASN, serta kebutuhan operasional kantor
 - Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, termasuk gedung dan kendaraan dinas

DPMPTSP mendorong perizinan yang lebih efisien dan transparan melalui:

- **Program Pelayanan Penanaman Modal**, termasuk:
 - Pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
 - Konsultasi perizinan berbasis risiko
 - Pengelolaan data dan sistem informasi perizinan
 - Koordinasi penetapan pemberian fasilitas/insentif

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.691.337.570,00		4.871.829.732,00		4.947.408.000,00		4.993.371.573,00		4.979.448.019,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.580.337.570,00		3.610.192.032,00		3.668.233.536,00		3.778.822.334,00		3.765.302.299,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	93.35	95	3.580.337.570,00	95.50	3.610.192.032,00	96	3.668.233.536,00	96.50	3.778.822.334,00	97	3.765.302.299,00	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.444.215.735,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	294	2.444.215.735,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.444.215.735,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		2.345.666.263,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	294	2.444.215.735,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00	294	2.345.666.263,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	400	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perundang-Undangan													
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.365.500,00		126.500.000,00		139.000.000,00		147.500.000,00		158.000.000,00		
Jumlah Laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120	150	107.365.500,00	160	126.500.000,00	170	139.000.000,00	180	147.500.000,00	200	158.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12											
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	60				60				60			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12				12				12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60				60				65			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.365.500,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	6.365.500,00	12	6.500.000,00	12	7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00	12	37.500.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	60	25.000.000,00	60	30.000.000,00	60	33.000.000,00	60	35.000.000,00	60	37.500.000,00		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120	150	25.000.000,00	160	30.000.000,00	170	33.000.000,00	180	35.000.000,00	200	37.500.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	26.000.000,00	60	30.000.000,00	65	33.000.000,00	65	35.000.000,00	70	37.500.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.000.000,00		205.525.769,00		343.067.273,00		438.156.071,00		396.136.036,00		
Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	21	177.000.000,00	30	205.525.769,00	21	343.067.273,00	1	438.156.071,00	10	396.136.036,00		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				177.000.000,00		205.525.769,00		343.067.273,00		438.156.071,00		396.136.036,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	21	177.000.000,00	30	205.525.769,00	21	343.067.273,00	1	438.156.071,00	10	396.136.036,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				606.756.335,00		577.500.000,00		580.500.000,00		585.500.000,00		600.500.000,00		
Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	606.756.335,00	12	577.500.000,00	12	580.500.000,00	12	585.500.000,00	12	600.500.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	10		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1212	12				12				12			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	180.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	160.000.000,00		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	10	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				401.256.335,00		402.000.000,00		405.000.000,00		410.000.000,00		415.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1212	12	401.256.335,00	12	402.000.000,00	12	405.000.000,00	12	410.000.000,00	12	415.000.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.500.000,00		203.500.000,00		108.500.000,00		110.500.000,00		113.500.000,00		
Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	93.500.000,00	3	203.500.000,00	3	108.500.000,00	3	110.500.000,00	3	113.500.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Dipelihara/Direhabil itasi													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	15		15		15		15		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	23	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	15	75.000.000,00	15	80.000.000,00	15	85.000.000,00	15	85.000.000,00	15	85.000.000,00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.500.000,00		23.500.000,00		13.500.000,00		15.500.000,00		18.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	1	1	13.500.000,00	3	23.500.000,00	3	13.500.000,00	3	15.500.000,00	3	18.500.000,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	23	1	5.000.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		100.070.000,00		101.460.973,00		6.202.106,00		6.206.447,00		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	0	92	100.000.000,00	94	100.070.000,00	96	101.460.973,00	98	6.202.106,00	98	6.206.447,00	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.004.200,00		6.086.658,00		6.202.106,00		6.206.447,00		
Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	2	6.000.000,00	2	6.004.200,00	2	6.086.658,00	2	6.202.106,00	2	6.206.447,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.004.200,00		6.086.658,00		6.202.106,00		6.206.447,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	2	6.000.000,00	2	6.004.200,00	2	6.086.658,00	2	6.202.106,00	2	6.206.447,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				94.000.000,00		94.065.800,00		95.374.315,00		-		-		
Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	1	94.000.000,00	1	94.065.800,00	1	95.374.315,00		-		-		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				94.000.000,00		94.065.800,00		95.374.315,00		-		-		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	1	94.000.000,00	1	94.065.800,00	1	95.374.315,00		-		-		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				700.000.000,00		850.350.000,00		862.169.865,00		885.842.196,00		885.203.986,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	70	92	700.000.000,00	94	850.350.000,00	96	862.169.865,00	98	885.842.196,00	98	885.203.986,00	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000,00		850.350.000,00		862.169.865,00		885.842.196,00		885.203.986,00			
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	700.000.000,00	1	850.350.000,00	1	862.169.865,00	1	885.842.196,00	1	885.203.986,00			
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	1		1		1		1		1				
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				480.000.000,00		500.300.000,00		501.304.863,00		510.842.196,00		510.203.986,00			
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	480.000.000,00	1	500.300.000,00	1	501.304.863,00	1	510.842.196,00	1	510.203.986,00			
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				220.000.000,00		350.050.000,00		360.865.002,00		375.000.000,00		375.000.000,00			
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	1	220.000.000,00	1	350.050.000,00	1	360.865.002,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00			
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				212.000.000,00		212.148.400,00		215.097.263,00		219.141.091,00		219.294.490,00			
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	0	92	212.000.000,00	94	212.148.400,00	96	215.097.263,00	98	219.141.091,00	98	219.294.490,00	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	0	92		94		96		98		98			
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				212.000.000,00		212.148.400,00		215.097.263,00		219.141.091,00		219.294.490,00		
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	1	212.000.000,00	1	212.148.400,00	1	215.097.263,00	1	219.141.091,00	1	219.294.490,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.959	11.050				11.100				11.150			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	176	125		100		75		50		50			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				193.000.000,00		193.148.400,00		196.097.263,00		200.141.091,00		200.294.490,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.959	11.05 0	193.000.000,00	11.100	193.148.400,00	11.150	196.097.263,00	11.200	200.141.091,00	11.200	200.294.490,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	176	125	7.000.000,00	100	7.000.000,00	75	7.000.000,00	50	7.000.000,00	50	7.000.000,00		
Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal				-		-		-		-		-		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				99.000.000,00		99.069.300,00		100.446.363,00		103.363.846,00		103.440.797,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	0	92	99.000.000,00	94	99.069.300,00	96	100.446.363,00	98	103.363.846,00	98	103.440.797,00	2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				99.000.000,00		99.069.300,00		100.446.363,00		103.363.846,00		103.440.797,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13	30	99.000.000,00	35	99.069.300,00	40	100.446.363,00	45	103.363.846,00	45	103.440.797,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210	80		90		90		90		90			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	8		9		10		11		11			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	8	20.000.000,00	9	20.000.000,00	10	20.000.000,00	11	20.000.000,00	11	20.000.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				55.000.000,00		59.069.300,00		60.446.363,00		63.363.846,00		63.440.797,00		

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2024-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210	80	55.000.000,00	90	59.069.300,00	90	60.446.363,00	90	63.363.846,00	90	63.440.797,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				24.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13	30	24.000.000,00	35	20.000.000,00	40	20.000.000,00	45	20.000.000,00	45	20.000.000,00		

Tabel 4.3. memuat Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Ada 5 (lima) Program dengan indikator outcome/output yang jelas dengan target dan pagu indikatif tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Adapun baseline capaian kinerja adalah capaian kinerja di tahun 2024.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan outcome yang diharapkan serta kegiatan dan subkegiatan prioritas dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah secara terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar Rupiah	2,145	2,15	2,152	2,155	2,157	2,16	2,162	
3.	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	0	1	2	4	6	8	8	Tahun 2024 Jenis Layanan sebanyak 132 dengan peningkatan secara berkelanjutan hingga bertambah menjadi 140 di tahun 2030
4.	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	0	5.010	5.020	5.030	5.040	5.050	5.060	
5.	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	0	90	92	93	95	97	98	

Berdasarkan tabel 4.5. indikator kinerja utama yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2026 hingga 2030. Indikator-indikator ini mencerminkan target strategis yang ingin dicapai guna mendukung iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang efektif, serta peningkatan kontribusi investasi terhadap pembangunan daerah. Melalui indikator-indikator tersebut, DPMPTSP menetapkan arah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi, memperbaiki kualitas layanan publik melalui MPP, serta memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan peta jalan (roadmap) pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan publik yang terukur dan realistis demi mendukung prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	0	0,1	0,15	0,2	0,22	0,25	0,27	

Tabel 4.6 merupakan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja pada urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yaitu "*Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota*". Indikator ini bersifat positif, yang berarti semakin tinggi nilai capaian, maka kinerjanya dianggap semakin baik. Target yang digunakan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan realisasi investasi di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai program, regulasi yang mendukung iklim usaha, serta penyederhanaan perizinan.

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional khususnya pada aspek Pertumbuhan Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal, yang diimplementasikan melalui kegiatan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik. Kegiatan ini difokuskan pada penyediaan layanan perizinan yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), dengan alokasi anggaran yang meningkat secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2030 seperti dalam tabel 4.7 dibawah ini.

TABEL 4.7
DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan Ekonomi								
	Kegiatan Kemudahan Perizinan di Daerah	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
			2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	193.000.000	193.148.400	196.097.263	200.141.091	200.294.490	Memberikan Kemudahan dan Pendampingan dalam Pelayanan Perizinan

BAB V

PENUTUP

Renstra DPMPTSP ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program, serta target kinerja tahunan diselaraskan dengan pendekatan kinerja yang terukur dan berbasis hasil (outcome).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun ke depan, dengan mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pengarusutamaan Gender menjadi strategi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan adil gender di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan, diharapkan DPMPTSP dapat memberikan layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan investasi.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang erat antara DPMPTSP dengan perangkat daerah lain, pelaku usaha, masyarakat, serta dukungan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, koordinasi, integrasi, dan konsistensi pelaksanaan program harus terus ditingkatkan.

DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas layanan, dan kapasitas kelembagaan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian,

dan kenyamanan bagi para investor, serta memperluas akses layanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijabarkan dalam Renja dan RKA. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Kinerja menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, *stakeholders*, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP.

Akhir kata, semoga Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai target pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya masyarakat Temanggung yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka. Bid		
Kasi/Kasub-bag		

 **DWI SUKARMEI ST., MT.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008